Bulan:

Dalaii .								$\frown$	\						
	1	2	3	4	5	6	7 (	8	9	10	11	12			



Tanggal:

. ubbu					$\overline{}$										
1	2	3	4	5(	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara	Jateng Pos	Jawa Pos	Media 🖊	Wawasan	
Merdeka	Jaceng Fos	Jawa FO3	Indonesia		
Tribun	Radar	Donublika	Vananas	Koran	
Jateng	Semarang	Republika	Kompas	Tempo	

Wilayah: Kabupaten Jepara

## Halaman 9

## Jepara Peroleh DBHCHT Rp6,7 Miliar

JEPARA - Tahun 2019 ini Kabupaten Jepara memperoleh dana sebesar Rp 6,7 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DB-HCHT). Hal ini disampaikan Plt Kepala Diskominfo Jepara Mulyaji, kemarin. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan sektor kesehatan masyarakat, termasuk sarana dan prasarana puskesmas.

"Konsentrasi penggunaan DBHCHT memang untuk kesehatan, sehingga kami alokasikan untuk upaya peningkatan kesehatan masyarakat," terangnya.

Menurutnya, tidak hanya menerima dana DBHCHT, Pemkab Kudus mengupayakan penekanan adanya rokok ilegal di Jepara. Dengan begitu Jepara bisa mendapat DBHCHT lebih besar lagi.

"Kami berupaya membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membangun sinergitas dengan semua elemen pemerintah dalam memberantas rokok ilegal di Jepara," katanya.

Mulyaji meminta, seluruh pengusaha agar mengurus perizinan usaha mereka. Ini berlaku bagi pengusaha yang belum berizin atau hendak membuka usaha rokok di Jepara.

Kas<mark>i Pe</mark>nyuluhan dan Layanan Informasi B<mark>ea</mark> dan Cukai Kudus Dwi Prasetyo Rini menyampaikan, pada dasarnya pengurusan izin rokok tidaklah sulit. Dibutuhkan kesadaran dari para pengusaha rokok ilegal.

"Kami akan bantu untuk pengurusan izin, silakan datang ke kantor," tuturnya.

Sanksi untuk pengusaha rokok ilegal, menurutnya, sangat berat. Jika kedapatan memproduksi rokok ilegal, produsen dapat dipidana minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara. Dia mengaku di Jepara juga masih terdapat produsen rokok ilegal ini.

"Rokok ilegal ini adalah rokok tidak bercukai, rokok dengan pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok polos tanpa pita cukai," paparnya.

Sekretaria DBHCHT
Jateng Een Erlina
mengutarakan, tidak semua
kabupaten/kota mendapatkan anggaran DBHCHT ini.
Selain wilayah penghasil tembakau, dana bagi hasil cukai
ini diperuntukkan bagi
daerah industri penghasil
cukai.

"Jepara ini termasuk kawasan pengembangan industri penghasil cukai. Untuk itu, kami berharap semua produksi rokok yang ada di Jepara semuanya mengantongi izin," tandasnya.